



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2018-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa *SDGs (Sustainable Development Goals)* adalah komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan acuan penting serta *mainstreaming* (pengarusutamaan) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Program Pembangunan, Gubernur harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* Tahun 2018-2021.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* TAHUN 2018-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.



4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku penggunaan anggaran/pengguna barang.
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Filantropi adalah kedermawanan seseorang yang berarti bahwa orang yang senantiasa terbuka dan senang memberikan sesuatu kepada orang lain seperti menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Akademisi atau akademikus adalah seseorang yang berpendidikan tinggi, atau intelektual, atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi. Pengertian lain dari kata ini adalah anggota suatu akademi.
9. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat dengan *SDGs* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian disingkat dengan TPB adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
10. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah rencana aksi pencapaian target TPB tingkat daerah provinsi yang berisi komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan acuan penting serta pengarusutamaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maros 2016-2021.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan perangkat daerah.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RAD Pelaksanaan TPB disusun untuk perencanaan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
- (2) RAD Pelaksanaan TPB meningkatkan kemitraan antara pemangku kepentingan yang lebih kuat berdasarkan kesetaraan dan inklusivitas dan difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, menguatkan perekonomian, meningkatkan wawasan lingkungan serta mencapai kesetaraan dan keadilan.

BAB III

KETERKAITAN SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Pengarusutamaan *SDGs* harus dilakukan dalam proses perencanaan daerah dan diarahkan untuk menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target dan indikator *SDGs* diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pencapaian target *SDGs* tingkat daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya untuk mendukung pencapaian *SDGs*.



BAB IV
TUJUAN DAN DOKUMEN RAD

Pasal 5

Tujuan RAD Pelaksanaan TPB meliputi 4 pilar dan 17 tujuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dokumen RAD Pelaksanaan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dokumen RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyempurnaan jika Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan TPB telah ditetapkan.

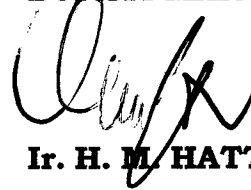
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 17 Januari 2016
BUPATI MAROS



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Paraf	
Kepala Bappeda	
Asisten	
Kepala Bappeda	
Kabid/Sekretaris	

1

KEPALA BAPPEDA DAERAH

TANGGAL

Diundangkan di Maros
pada tanggal 17 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

NOMOR : 21 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 JANUARI 2018

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE*
DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2018-2021

PEMBAGIAN PILAR DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Nama Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
A. Pilar Sosial	1. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
	2. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
	3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
	4. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.
	5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
B. Pilar Ekonomi	6. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
	7. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
	8. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
	9. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi
	10. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

g

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)					INSTANSI PELAKSANA	
			SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019	2020		2021
1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persentase balita gizi buruk	Persen		0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	Dinas Kesehatan
			Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Persen		0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Konsumsi Energi Per Kapita	kk/kap/hari		1,930	1,944	1,951	1,958	1,965	
2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen		100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Makanan Tambahan	Persen		0.70	0.62	0.58	0.54	0.50	
			Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Skor Pola Pangan Harapan	Point		78.5	83.2	85.1	86.9	90.7	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		MENINGKATKAN HASIL PEMANFAATAN LAHAN										
3	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Meningkatnya Produksi Bahan Pangan Utama Dan Bahan Pangan Lainnya	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Indeks Produksi Tanaman Pangan	Nilai Indeks		83.48	98.22	98.24	98.26	98.26	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Indeks Produksi Tanaman Hortikultura	Nilai Indeks		64.7	103.56	73.07	143.45	71.57	
				Indeks Tanaman Perkebunan	Nilai Indeks		98.46	105.19	139.5	304.62	585.54	

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA	
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020
4	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	Meningkatnya Produksi Peternakan Dan Perikanan	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Indeks Produksi Peternakan	Nilai Indeks	100	112.78	119.8	127.29	135.77	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	MENINGKATKAN TARAF HIDUP PENDUDUK, BAIK SEBAGAI INDIVIDU MAUPUN SEBAGAI									
1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Individu	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persentase Cakupan Pelayanan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan.	Persen	94.82	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Individu	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Imunisasi Lengkap Dasar Pada Bayi	AKB Persen	9.41 80.00	3.87 84.00	2.42 92.00	1.14 96.00	0.54 100	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)						INSTANSI PELAKSANA
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019	2020	2021	
3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Individu	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Persentase Prevalensi HIV.	Persen		0.02	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	Dinas Kesehatan
			Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Rasio Prevalensi Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk.	Rasio		15.46	45.46	55.46	65.46	75.46	
4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Individu	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persentase Merokok Penduduk usia 15 - 19 Tahun.	Persen		1.81	1.08	0.72	0.36	0	Dinas Kesehatan
			Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persentase Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (18 – 75 Tahun)	Persen		1.96	1.57	1.37	1.18	0.98	
			Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persentase Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18 Tahun Keatas.	Persen		0.08	0.06	0.05	0.04	0.04	
		MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PEMERATAAN DAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN										
5	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Transportasi Daerah	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Indeks Fatalitas (Per 10.000 Kendaraan)	Nilai Indeks		13.05	10.92	9.86	8.78	7.7	Dinas Perhubungan
6	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Persentase PUS Yang memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Jenis Metode Kontrasepsi Modern	Persen		69.39	70.08	71.49	72.21	72.93	Dinas

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA		
			SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020	2021
			Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi PUS Menurut Cara Pakai	Persen		56.42	57.55	58.13	58.71	59.30	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Persentase penurunan Angka Melahirkan Pada Remaja Kelompok Usia 15 - 19	Persen		1.16	1.14	1.13	1.12	1.11	
		MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS										
7	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persen		61.00	82.00	88.00	94.00	100.00	Dinas Kesehatan
8	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase Ketersediaan Obat DanVaksin	Persen		90.00	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)					INSTANSI PELAKSANA	
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019	2020		2021
9	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Ketersediaan Dokter Per Satuan Penduduk	Rasio		0.47	0.58	0.65	0.72	0.79	Dinas Kesehatan
				Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Rasio		30.56	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	PENDIDIKAN BERKUALITAS	MENINGKATKAN TARAF HIDUP PENDUDUK, BAIK SEBAGAI INDIVIDU MAUPUN SEBAGAI										
1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Individu	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk usia Di Atas 15 Tahun	Persen		7.24	7.40	7.47	7.55	7.63	Dinas Pendidikan
2	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Sebagai Individu	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Angka Partisipasi Murni	APM		83.57	85.57	86.57	87.57	88.57	Dinas Pendidikan
			Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Angka Melek Huruf	AMH		99.18	96.35	100	100	100	Dinas Pendidikan
		MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS										
3	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Rasio Guru Per Murid Perkelas Rata - Rata.	Rasio		0.34	0.31	0.30	0.29	0.27	Dinas Pendidikan

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA		
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020	2021
5	KESETARAAN GENDER		MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERKINERJA TINGGI									
1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif	Jumlah Kebijakan Yang Responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Di Harmonisasikan Dengan Pengarusutamaan Gender Dan HAM	Persen		4.76	14.29	19.05	23.81	28.57	
		MENINGKATKAN TARAF HIDUP PENDUDUK, BAIK SEBAGAI INDIVIDU MAUPUN SEBAGAI MASYARAKAT										
2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persentase Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Persen		21.00	10.00	7.00	4.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.	Persen		100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Proporsi Perempuan Umur 20 - 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Angka Usia Kawin Pertama	Persen		51.26	50.24	49.74	49.24	48.75	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA		
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020	2021
			Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Persentase penurunan Angka Melahirkan Pada Remaja Kelompok Usia 15 - 19	Persen		1.16	1.14	1.13	1.12	1.11	Keluarga Berencana
4	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	Persen		8.08	15.58	19.33	23.08	26.83	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta.	Persen		91.92	88.58	82.25	79.26	76.38	
5	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil revidi dari konferensi konferensi tersebut.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Persentase Remaja Yang Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Generasi Berencana	Persen		7.97	8.13	8.21	8.29	8.38	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persentase Penurunan Angka Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terlayani.	Persen		12.43	10.00	9.40	8.80	8.20	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persentase PUS Yang memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Jenis Metode Kontrasepsi Modern	Persen		69.39	70.08	71.49	72.21	72.93	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
6	AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS										
1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Proporsi Populasi Yang Menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Persentase Peningkatan Cakupan Pelayanan SPAM Pada Wilayah Perdesaan Dan Kelurahan	Persen		60.49	80.24	80.24	100	100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA		
			SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020	2021
			Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase Penduduk Yang Mengakses Air Minum	Persen		100	100	100	100	100	
2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Rumah Tangga Bersanitasi	Persen		79.00	88.18	93.16	98.43	100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah.	Persen		-	20.00	35.00	50.00	60.00	
		MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP										
3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Status Mutu Air Sungai Maros (Hulu)	BMA		3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	Dinas Lingkungan Hidup
				Status Mutu Air Sungai Maros (Tengah)	BMA		8.11	3.95	3.95	3.95	3.95	
				Status Mutu Air Sungai Maros (Hilir)	BMA		12.77	8.11	8.11	8.11	8.11	
				Status Mutu Air Sungai Pute (Hulu)	BMA		3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	
				Status Mutu Air Sungai Pute (Tengah)	BMA		14.17	8.11	8.11	8.11	8.11	
				Status Mutu Air Sungai Pute (Hilir)	BMA		22.32	8.11	8.11	8.11	8.11	
				Status Mutu Air Sungai Bantimurung (Hulu, Tengah, Hilir)	BMA		5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA		
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020	2021
				Status Mutu Air Sungai Rammang - Rammang	BMA		12.92	8.11	8.11	8.11	8.11	
7	PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI		MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI									
	1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Secara Merata	PDB per kapita.	PDRB Per Kapita	Juta/ Jiwa	46.47	52.51	57.09	62.08	67.49	Lintas Sektoral/SKPD
			MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH									
	2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Meningkatnya Produktifitas Total Daerah	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Angkatan Kerja Per Sektor Lapangan Usaha PDRB Nilai Tambah Per Sektor Lapangan Usaha PDRB	Persen Persen	86.84 70.20	2.72 6.60	2.80 6.81	2.86 7.18	2.91 7.41	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persentase UMKM	Persen	99.23	99.18	99.09	99.05	99.00	Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan
	4	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Meningkatnya Produktifitas Total Daerah	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.03	3.32	3.07	2.86	2.68	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA		
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020	2021
		MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS										
5	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Persentase Keselamatan Dan Perlindungan Kerja	Persen		1.68	16.68	26.68	36.68	46.68	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun.	Kasus		10	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Persentase Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI										
6	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN										
		Meningkatnya Daya Tarik Dan Daya Saing Kawasan Wisata Daerah	Jumlah wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Persentase Kunjungan Wisata	Persen		54.67	75.00	83.33	91.67	100	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
8	INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PEMERATAAN DAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN										

9

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA		
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020	2021
1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Umum Yang Berkualitas	Kondisi mantap jalan nasional.	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen		39.71	80.74	93.08	100	100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Transportasi Daerah	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Arus penumpang angkutan umum	Jiwa		14.811.290	19.443.887	22.278.103	25.525.444	25.525.444	Dinas Perhubungan
		MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI										
2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen		17.41	15.8	15.05	14.34	13.67	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
		MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PEMERATAAN DAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN										
3	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Ketersediaan Layanan Akses Internet	Persen		52.98	58.94	77.48	86.09	90.00	Dinas Komunikasi Informatika
9	BERKURANGNYA KESENJANGAN	MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI										
1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	Persen		88.33	89.32	89.78	90.22	90.64	Lintas Sektoral/SKPD

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)					INSTANSI PELAKSANA	
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019	2020		2021
		MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN										
		Meningkatnya Desa Mandiri Dan Berkembang	Jumlah desa tertinggal	Indeks Pembangunan Desa	IPD		60.54	64.54	66.35	68.16	69.97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Jumlah Desa Mandiri.									
		MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS										
	2	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Kepesertaan Pekerja Formal Pada SJSN Ketenagakerjaan	Orang	7,683	8,402	9,242	10,166	11,183	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10		KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PEMERATAAN DAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN									
	1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Umum Yang Berkualitas	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Rasio Permukiman/ Perumahan Layak huni	Rasio	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
				Proporsi Penduduk Perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Lingkungan Permukiman kumuh	Persen	0.35	0.21	0.04	0.00	0.00	Lintas Sektor/SKPD
			MENINGKATKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN TERHADAP MITIGASI BENCANA									
	2	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang - orang dalam situasi rentan.	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indeks Resiko Bencana	IRB	151.2	134.4	126	117.6	109.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).								

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA		
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020	2021
	1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	Dokumen Strategi Pengurangan Resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indeks Resiko Bencana	IRB	151.2	134.4	126.0	117.6	109.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	EKOSISTEM LAUTAN		MENINGKATKAN HASIL PEMANFAATAN LAHAN									
	1	Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.	Meningkatnya Produksi Peternakan Dan Perikanan	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negaranegara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Indeks Perikanan Tangkap Indeks Perikanan Budidaya	Nilai Indeks Nilai Indeks	100.20 100.25	102.29 102.43	102.22 102.38	102.18 102.33	102.13 102.27	Dinas Perikanan
14	EKOSISTEM DARATAN		MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP									
	1	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
15	PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH		MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERKINERJA TINGGI									

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA		
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020	2021
1	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Opini WTP	Opini BPK		C & C	C & C	C & C	C & C	C & C	Badan Keuangan Daerah
			Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai SAKIP		Nilai Interval Skala		C	CC	B	B	
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persentase Perluasan Cakupan Produk Dalam E-Catalog	Persen			5.00	7.00	8.00	9.00	10.00
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks Reformasi Birokrasi (Skor 1 - 100)	IRB		-	15	25	35	45	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM			-	70	85	90	95	
		MENINGKATKAN TARAF HIDUP PENDUDUK, BAIK SEBAGAI INDIVIDU MAUPUN SEBAGAI										

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	BASELINE (2015)				INSTANSI PELAKSANA	
	SASARAN GLOBAL		SDGs/TPB	RPJMD		TPB	RPJMD	2018	2019		2020
2	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	Persen	8.08	15.58	19.33	23.08	26.83	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS									
3	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran.	Persen	4.17	80.00	82.50	85.00	87.50	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16	KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH									
1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persentase Potensi Penerimaan Daerah Yang Terealisasi. Persentase Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah.	Persen Persen	92.44 10.24	93.5 20.24	94 25.24	95 30.24	96 35.24	Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah

8

PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA/ORGANISASI NON-PEMERINTAH

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
PT. Angkasa Pura I												
Tujuan 1. Tanpa kemiskinan	Bantuan sembako gratis	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan sembako	Orang	521	500	0	0	0	236,203,200	Kelurahan Hasanuddin; Desa Baji Mangai; Desa Marumpa; Desa Tellumpocoe; Kelurahan Bontoa; Desa Bontomatene; Desa Tenrigangkae; Desa Pattontongan	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
Tujuan 3: kehidupan sehat dan sejahtera	Pembangunan dan renovasi posyandu	Jumlah pos pelayanan terpadu yang berada dalam kondisi yang baik	Unit	1	-	-	-	-	151,449,494	Kompleks Angkasa Pura; Lingkungan Padang Sessere	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
	Pelayanan kesehatan gratis	Jumlah balita, anak-anak, ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan pelayanan	Orang	3637	3022	2172	0	0	837,977,335	Kelurahan Hasanuddin; Desa Bajimangai; Desa Marumpa; Desa Tellumpocoe; Kelurahan Bontoa; Desa Bontomatene; Desa Tenrigangkae; Desa Pattontongan	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
	Khitanan massal	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan khitanan massal gratis	Orang	0	0	150	0	0	146,469,000	Maros	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
	Bantuan kursi roda	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan	Orang	0	15	0	0	0	16,537,500	Maros	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
Tujuan 4: pendidikan berkualitas	Penyediaan peralatan sekolah	Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan peralatan sekolah	Buah	200	638	0	0	0	294,400,000	Maros	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i

TUJUAN SDGs	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
	Pembangunan ruang kelas	Jumlah ruang kelas	Ruang	0	0	1	0	0	135,440,000	Kelurahan Hasanuddin	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
	Bantuan pemasangan paving block	Jumlah sarana pendidikan yang dibantu	Unit	0	1	0	0	0	68,790,000	Desa Baji Mangai; Lingkungan Barambang	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi layak	Bantuan pembangunan mck	Jumlah mck	Unit	0	10	0	0	0	749,690,000	Maros	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pembangunan center point kawasan wisata	Jumlah center point kawasan wisata	Unit	0	1	0	0	0	275,000,000	Kawasan wisata Rmmang-rammang	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
Tujuan 10: berkurangnya kesenjangan	Pembangunan balai desa	Jumlah balai desa	Unit	0	1	0	0	0	121,880,000	Desa Tenrigangkae	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
Tujuan 11: kota dan permukiman yang berkelanjutan	Penyediaan tempat sampah	Jumlah tempat sampah yang tersedia	Unit	0	0	0	0	0	5,000,000	Kelurahan Hasanuddin	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
	Bantuan korban bencana	Jumlah bantuan untuk korban bencana	Unit	0	2	0	0	0	31,500,000	Kelurahan hasanuddin	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
Tujuan 15: ekosistem daratan	Bantuan pelestarian alam	Jumlah wilayah yang dibantu	Unit	0	0	1	0	0	45,000,000	Desa Ampekale	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
Tujuan 16: perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Bantuan renovasi masjid	Jumlah tempat ibadah yang dibantu	Unit	1	4	6	0	0	570,612,000	Kelurahan hasanuddin; desa bajimangai; desa tenrigangkae; mesjid nurussudur maros.	CSR Perusahaan	PT Angkasa Pura i
Oxfam												
Tujuan 1. Tanpa kemiskinan	Pemberdayaan anak muda	Jumlah anak muda yang akan diberdayakan/dilatih	Orang	-	30	50	100	150	300,000,000	Kecamatan Marusu; Kecamatan Lau	IKEA (Founding)	LSM Oxfam

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
	Softskill training	Jumlah anak muda yang mendapatkan softskill training	Orang		-	200	250	300	105,000,000	Kecamatan Marusu; Kecamatan Lau	IKEA (Founding)	LSM Oxfam
	Pelatihan keterampilan	Jumlah anak muda yang mendapatkan pelatihan keterampilan	Orang		-	-	50	75	50,000,000	Kecamatan Marusu; Kecamatan Lau	IKEA (Founding)	LSM Oxfam
	Pembagian sembako gratis pada masyarakat kurang mampu	Jumlah masyarakat kurang mampu (miskin) yang mendapatkan bantuan sembako gratis	Orang							Kecamatan Marusu; Kecamatan Lau	IKEA (Founding)	LSM Oxfam
Tujuan 5: Kesenjangan Gender	Gender training domestik rumah tangga	Jumlah peserta gender training camp	Orang	-	-	8	10	15	400,000,000	Kecamatan Marusu; Kecamatan Lau	Kecamatan marusu, kecamatan lau	IKEA (Founding)
Perkumpulan Katalis												
Tujuan 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Fgd pendalaman pengembangan pengaduan petani terkait layanan kebijakan pupuk bersubsidi	Peserta dari unsur petani, poktan, lsm, pemerintah terkait	Orang			25			20,000,000	Kabupaten Maros	Oxfam kerjasama KRKP	Perkumpulan Katalis
	Diskusi media dan pemerintah untuk exit strategy/ keberlanjutan loby untuk pengawalan kesepakatan	Unsur petani, poktan, lsm media, instansi terkait	Orang			25			20,000,000	Kabupaten Maros	Oxfam kerjasama KRKP	Perkumpulan Katalis
Pamsimas												
Tujuan 6. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang	Pembangunan sarana air minum pedesaan	Jumlah masyarakat yang mengakses sarana air minum	Orang		3000	3500	5000		5,000,000,000	Kecamatan Bontoa, Marusu, Cenrana, Simbang, Moncongloe, Maros, Bantimurung	APBD, APBN	Kelompok keswadayaan masyarakat (kkm), satlak pamsimas

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
berkelanjutan untuk semua orang.	Promosi phbs	Jumlah masyarakat yang mengakses terhadap sanitasi	Orang		300	300	3000		20,000,000	Kecamatan Bontoa, Marusu, Cenrana, Simbang, Moncongloe, Maros, Bantimurung	APBD. APBN, APBDes, Kontribusi Masyarakat	Kelompok keswadayaan masyarakat (kkm), satlak pamsimas
	Pelatihan kelembagaan air minum dan sanitasi perdesaan	Jumlah masyarakat menerima pelatihan	Orang		200	200	200		25,000,000	Kecamatan Bontoa, Marusu, Cenrana, Simbang, Moncongloe, Maros, Bantimurung	APBD, APBN	Kelompok keswadayaan masyarakat (kkm), satlak pamsimas
KPI Cab. Maros												
Tujuan 5. Kesetaraan gender	Pkd untuk balai perempuan	Terlaksananya pelatihan kader dasar selama tiga hari	Orang	-	70	80	100	150		Kecamatan Bantimurung;	Swadaya	KPI Cab. Maros
	Up grading pengurus cabang	Setiap pengurus tahu dan paham atas tupoksinya masing-masing, serta mengetahui strategi membesarkan organisasi	Orang		15	20	25	25		Kecamatan Turikale	Swadaya	KPI Cab. Maros
	Workshop perencanaan yang responsif gender	Peserta memiliki pengetahuan tentang perencanaan yang responsif gender, baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten.	Orang		45	60	80	100		Kecamatan Bontoa	Swadaya	KPI Cab. Maros

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
	Pelatihan kewirausahaan disetiap balai perempuan	Anggota, dalam hal ini anggota balai, punya kemampuan dasar tentang kewirausahaan, sekaligus mampu menjadi penggerak wirausaha di tingkat desa	Orang		40	60	80	140		Kecamatan Bantimurung; kecamatan Bontoa	Swadaya dan kpi wilayah	KPI Cab. Maros
	Pelatihan jurnalistik	Anggota dan peserta perempuan memperoleh kemampuan jurnalistik yang baik.	Orang		50	60	75	80		Kecamatan Simbang	Swadaya dan kpi wilayah	KPI Cab. Maros

Universitas Muslim Maros, UMMA

Tujuan 2. Tanpa kelaparan	Lahan pendidikan dan pelatihan	Pemanfaatan lahan non-produktif	Ha				1,5		750,000,000	Kec. Moncongloe, Kec. Tanralilli, Kec. Tompobulu	Founding	Umma	
	Pelatihan inseminator	Jumlah peternak yang mendapatkan pelatihan keterampilan	Orang				15		750,000,000	Kec. Moncongloe, Kec. Tanralilli, Kec. Tompobulu	Founding	Umma	
	Bantuan ternak	Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan ternakeliharaan	Hewan				90		630,000,000	Kec. Moncongloe, Kec. Tanralilli, Kec. Tompobulu	Founding	Umma	
	Pengembangan kawasan agropolitan	Penerapan teknologi inseminasi buatan (ib)		Unit					1	125,000,000	Kec. Moncongloe, Kec. Tanralilli, Kec. Tompobulu	Founding	Umma
		Pengolahan teknologi pakan		Unit					1	150,000,000	Kec. Moncongloe, Kec. Tanralilli, Kec. Tompobulu	Founding	Umma
		Pengolahan teknologi hasil ternak		Unit					1	300,000,000	Kec. Moncongloe, Kec. Tanralilli, Kec. Tompobulu	Founding	Umma

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
		Penerapan teknologi pengolahan limbah	Unit				1	150,000,000	Kec. Moncongloe, Kec. Tanralilli, Kec. Tompobulu	Founding	Umma	
Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim	Pelestarian lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan limbah berbasis ekonomi kreatif	Unit			1	2	150,000,000	Kec. Turikale, Kec. Lau	Founding	Umma	
Tujuan 15. Ekosistem daratan	Pelstarian kearifan lokal	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati dan sumber daya alam	Unit			1		100,000,000	Kec. Bantimurung, Kec. Bontoa	Founding	Umma	
		Menciptakan kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya	Unit				1	100,000,000	Kec. Bantimurung, Kec. Bontoa	Founding	Umma	
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas	Penyediaan beasiswa	Memotivasi dan memberi kesempatan masyarakat berprestasi	Orang			500	500	200,000,000	Umma	Founding	Umma	
Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Mewujudkan kemandirian dan percaya diri pemuda dalam berwirausaha	Orang			30	30	100,000,000	Umma	Founding	Umma	
	Pengembangan/pembinaan koperasi kampus	Menumbuhkan semangat usaha berkelanjutan	Orang			30	30	100,000,000	Umma	Founding	Umma	
Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrasturktur	Fasilitas bank mini	Peningkatan pemahaman sistem pengelolaan bank	Unit				1	200,000,000	Umma	Founding	Umma	

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
	Penyediaan jaringan internet	Akses informasi dan jurnal internasional	Unit				1	50,000,000	Umma	Founding	Umma	
	Pengadaan buku perpustakaan	Penguasaan referensi perkuliahan dan penelitian	Eksemplar				50	200,000,000	Umma	Founding	Umma	
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas	Pemberantasan buta aksara	Masyarakat local mampu membaca	Desa			3		150,000,000	Dusun Rammang-rammang Desa Salenrang	Founding	Umma	
		Masyarakat lokal mampu berhitung	Desa						Desa Samangki, Kec. Bantimurung			
		masyarakat lokal mampu menulis	Desa						Desa Leang-leang Kec. Bantimurung			
	Kampung bahasa	Masyarakat lokal mampu berbahasa indonesia yang baik dan benar	Desa			3		150,000,000	Dusun Rammang-rammang Desa Salenrang	Founding	Umma	
		Masyarakat local mampu berbahasa asing							Desa Samangki, Kec. Bantimurung			
									Desa Leang-leang Kec. Bantimurung			
	Pelatihan dan pendampingan peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran berbasis Informasi Teknologi	Guru terampilan menggunakan ict sebagai media pembelajaran	Sekolah			5	15	200,000,000	Kab. Maros	Founding	Umma	
		Guru terampil menggunakan ict sebagai media untuk alat evaluasi pembelajaran										
	Pelatihan e-learning	Guru mampu menggunakan e-learning dalam pembelajaran	Sekolah			5	15	200,000,000	Kab. Maros	Founding	Umma	

29

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
Tujuan 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Air laut menjadi tawar	Menerapkan pengelolaan air laut menjadi air tawar	Desa					1	150,000,000	Desa Panjalingan	Founding	Umma
Yayasan Bhakti												
Tujuan 5. Kesenjangan gender	Sistem Perlindungan Anak	Perda SPA	Kabupaten	2018		1				Kab. Maros	MAMPU BaKTI/ Pemda Maros	MAMPU BaKTI/ Pemda Maros
	RAD KLA	Pendampingan Penyusunan RAD KLA	Kabupaten	2018		1				Kab. Maros	MAMPU BaKTI/ Pemda Maros	MAMPU BaKTI/ Pemda Maros
		Perda Perlindungan Perempuan	Kabupaten	2018		1				Kab. Maros	MAMPU BaKTI/ Pemda Maros	MAMPU BaKTI/ Pemda Maros
	Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU)	Pendampingan beberapa kegiatan PERDA PAUD, KLA, RENSTRA Responsif Gender.	Kabupaten	2018		1	1			Kab. Maros	MAMPU BaKTI/ Pemda Maros	MAMPU BaKTI/ Pemda Maros
SAR (Sekolah Anggaran Rakyat) Kabupaten Maros												
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas	Diskusi Kampung dan Pembentukan Kelompok Baca Anggaran (KBA)	5 Kelompok KBA melakukan diskusi	Kelompok	2018		2	3			Kab. Maros	TAF	SAR (Sekolah Anggaran Rakyat) Kabupaten Maros

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
		5 kelompok pembentukan KBA	Kelompok	2018		2	3			Kab. Maros	TAF	SAR (Sekolah Anggaran Rakyat) Kabupaten Maros
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan Gender	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota SAR (Sekolah Anggaran Rakyat)	10 orang Anggota SAR (Sekolah Anggaran Rakyat) mengikuti pelatihan Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender terkait Hutan dan lingkungan	Sekolah	2018		5	5			Kab. Maros	TAF	SAR (Sekolah Anggaran Rakyat) Kabupaten Maros
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota KBA	5 Kelompok KBA mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender terkait Hutan dan lingkungan	Kelompok	2018		2	3			Kab. Maros	TAF	SAR (Sekolah Anggaran Rakyat) Kabupaten Maros
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan Gender, 11. Membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan	Diskusi Reguler Internal Anggota SAR dan PINUS terkait dengan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pada Lingkungan	5 kali diskusi reguler Anggota SAR	Kegiatan	2018		2	3			Kab. Maros	TAF	SAR (Sekolah Anggaran Rakyat) Kabupaten Maros

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
Tujuan 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kestaraan Gender, 11. Membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan	Temu Lingkar Belajar dan forum berbagi peduli Lingkungan pada isu Anggaran dan Perencanaan	Adanya 1 kali temu lingkaran Belajar dan forum Berbagi peduli lingkungan pada isu anggaran dan perencanaan	Kegiatan	2018			1			Kab. Maros	TAF	SAR (Sekolah Anggaran Rakyat) Kabupaten Maros
Pilar Nusantara (PINUS)												
Tujuan 11. Membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan	Lokakarya Membangun Strategi pencapaian dan percepatan Perhutanan Sosial di Sulawesi selatan	Teridentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian PS	Kegiatan	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
		Terbangunnya kesepakatan bersama tentang penyusunan pedoman pelaksanaan PS	Kegiatan	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
		Teridentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian PS	Kegiatan	2018			1				Kab. Maros	TAF

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
		Terumuskannya strategi dan aksi bersama dalam skala jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk PS	Kegiatan	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
Tujuan 5. Kesenjangan Gender, 11. Membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan	Pelatihan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Hutan dan Lahan Yang Responsif Gender	Meningkatnya Pengetahuan Peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan Responsif Gender	Kegiatan	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
		Adanya rekomendasi dari hasil analisis anggaran kepada pemerintah.	Kegiatan	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
Tujuan 11. Membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan	Workshop Skema Pembiayaan ADD untuk Lingkungan hidup	Meningkatnya pemahaman peserta tentang skema pembiayaan ADD untuk lingkungan hidup	Kegiatan	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
		Terbangunnya komitmen bersama untuk skema pembiayaan ADD Lingkungan hidup	Kegiatan	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
		Adanya rencana aksi untuk skema pembiayaan ADD Lingkungan hidup.	Dokumen	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel

TUJUAN SDGs	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR (2015)	TARGET PENCAPAIAN				ANGGARAN	LOKASI PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2017	2018	2019	2020				
Tujuan 5. Kesenjangan Gender,	Audience Kepada Pemangku Kebijakan Untuk Menyampaikan Hasil Analisis PPRG	Adanya kebijakan anggaran untuk PPRG	Dokumen	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
	Identifikasi Kelompok Masyarakat dan Kelompok Perempuan di Kawasan Hutan	Adanya gambaran umum (profil) desa dampingan (administrasi, dusun, luas lahan hutan, jumlah warga/kk,laki & perempuan)	Dokumen	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
		Teridentifikasinya kelompok masy & kelompok perempuan di kawasan hutan	Dokumen	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel
Tujuan 5. Kesenjangan Gender, 11. Membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan	Diskusi kampung tentang Advokasi Anggaran Perhutanan Sosial	Meningkatnya pemahaman KBA tentang skema perhutanan sosial, dan masalah-masalah yang ada di areal perhutanan sosial.pada 5 desa.	Kegiatan	2018			1			Kab. Maros	TAF	Pilar Nusantara (PINUS) SulSel

Paraf	
Kepala Bagian Hukum dan HAM	Sekda
	Asisten
	Kepala Bappeda
	Kabid/Sekretaris
TANGGAL	

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM